

## PILKADA SUMUT

# Bobby-Surya Menang Telak



### Unggul di 30 Kabupaten Kota

Medan, MIMBAR - Pasangan Bobby Nasution-Surya menang telak atas Edy Rahmayadi-Hasan Basari Sagala di 30 dari 33 kabupaten-kota pada Pilgub Sumut 2024.

Berdasarkan data yang dihimpun dari laman <https://data-pemilu.pages.dev/gubernur>, Bobby-Surya meraih 3.434.824 suara atau 64,52%. Sedangkan perolehan suara Edy-Hasan 1.888.914 atau 35,48%. Data tersebut akumulasi dari 24.099 TPS dari total 25.223 TPS (95,54%).

■ Bersambung ke Hal 7

### Banteng Siapkan Amunisi "Pertempuran" di MK

Jakarta, MIMBAR - Partai Banteng yang kalah telak di sejumlah provinsi kunci, termasuk Sumatera Utara, menyiapkan amunisi untuk "bertempur hukum" di MK (mahkamah konstitusi), berupa catatan data, bukti, video dan saksi atas terjadinya kecurangan TSM (terstruktur, sistematis, masif) dalam Pilkada 2024.



Gugatan dilayangkan PDIP ke MK di provinsi yang kalah. Kata Ketua PDIP Bidang Reformasi Sistem Hukum Nasional, Ronny Talapessy SH, MH (40), dalam konferensi pers di kantor DPP, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis 28/1, "Kami melihat telah terjadi TSM di Jawa Tengah, Sumatera Utara, Sulawesi Utara, Banten, dan Jawa Timur. Kami sedang kumpulkan data-data."

#### APARAT TAK NETRAL

Advokat kelahiran Manokwari (Papua Barat), itu, mengungkap, pihaknya juga menemukan aparat keamanan tak bersikap netral pada Pilkada 2024.

■ Bersambung ke Hal 7

### MEMANTAU RUANG MONITORING REKAPITULASI PENGHITUNGAN SUARA PILKADA SERENTAK 2024 :

Proses pemungutan suara pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024 telah selesai dilaksanakan. Saat ini, Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI sedang melakukan pemantauan rekapitulasi perhitungan suara nasional. Proses rekapitulasi perhitungan suara secara nasional ini melibatkan banyak tahapan. Nantinya, setelah rekapitulasi perhitungan suara nasional selesai dilaksanakan, KPU RI akan mengumumkan perolehan hasil hitung suara di seluruh daerah di Indonesia. (Foto Liputan6.com)

### PDIP: Pilkada 2024 Terburuk!

Update Kasus Judi Online Komdigi

## Polisi Ciduk 26 Tersangka

### 4 LAGI MASIH DIBURU

Jakarta, MIMBAR - Polisi secara total telah menangkap dan menetapkan 26 orang sebagai tersangka kasus dugaan penyalahgunaan wewenang pemblokiran situs judi online melibatkan pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi).

Dari puluhan tersangka itu, 24 di antaranya lebih dulu ditangkap dan telah ditampilkan dalam konferensi pers pada Senin (25/11) lalu.

Beberapa tersangka itu di antaranya adalah Alwin Jabarti Kiemas, eks komisaris BUMN, Zulkarnaen Apriliantony alias Tony Tomang, Adhi Kismanto, hingga Denden Imadudin Soleh.

Para tersangka dijerat dengan Pasal 303 KUHP dan atau Pasal 27 ayat (2) Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik dan atau Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5 Undang-undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) jo Pasal 55 KUHP dan 56 KUHP.

■ Bersambung ke Hal 7

### Jadwal Salat

30 JUMADIL AWAL 1446 H

Subuh : 04:55 WIB	Maghrib : 18:14 WIB
Zuhur : 12:16 WIB	Isya : 19:27 WIB
Ashar : 15:39 WIB	

■ Untuk kota Medan sekitarnya

## Hidayah

### UMP Naik 6,5 Persen

Oleh Dr A Rasyid, MA (Dosen FIS UINSU)



PRESIDEN Prabowo pada Jumat, kemaren telah menetapkan kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) sebesar 6,5% untuk tahun 2025. Menteri Tenaga Kerja sebelumnya mengusulkan kenaikan 6 persen. Presiden Asosiasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia menyangkan sikap pemerintah yang tidak memenuhi tuntutan mereka kenaikan 20 persen.

Langkah diambil pemerintah ini mengikuti masukan dari serikat pekerja dan pengusaha serta mempertimbangkan daya saing ekonomi.

■ Bersambung ke Hal 7

Medan, MIMBAR - PDIP Sumut mengklaim Pilkada 2024 di daerahnya merupakan pilkada terburuk dalam sejarah. Alasannya, karena banyak praktik yang bertentangan dengan azas penyelenggaraan pilkada (Luber-Jurdil) terutama intervensi dan intimidasi terhadap pemilih.

Kata Ketua PDIP Sumut, Rapidin Simbolon (57) --dikutip dari laman beritasatu Ahad (1/12)-- "Saya meyakini Pilkada 2024 merupakan pilkada terburuk dari pilkada yang pernah ada. Sebab kekuasaan tidak malu-malu lagi melanggar etika moral dalam meng-endorse calon dari pihak mereka."

■ Bersambung ke Hal 7



### Angka DBD di Sumut Naik

## Tercatat 52 Kasus Kematian

Medan, MIMBAR - Ancaman penyakit demam berdarah dengue (DBD) di Sumut meningkat. Pemprov Sumut turut mewanti peningkatan kasus, terlebih saat musim penghujan.

Berdasarkan data Dinkes Sumut, kasus DBD hingga November 2024 saat ini mencapai 7994 kasus, 52 kasus di antaranya meninggal dunia.

"Sumut sampai saat ini ada 7994 kasus DBD. Jadi memang ada kenaikan. Untuk tahun 2024 sampai saat ini ada 52 kasus kematian. Untuk DBD peningkatannya dua kali lipat tapi kematiannya menurun," ungkap Sekretaris Dinkes Sumut Rusdin

Pinem usai acara Langkah Bersama Cegah DBD PT Takeda Innovative Medicine, Minggu (1/12/2024).

Rusdin menyebutkan angka kasus DBD tertinggi di Sumut berada tiga kabupaten.

"Paling tinggi Kabupaten Mandailing Natal, Kabupaten Karo, dan Kabupaten Nias Selatan," ujarnya.

Terkait hal ini, Rusdin menyebut masyarakat perlu

waspada dan melakukan antisipasi terhadap kasus demam berdarah.

"Langkahnya ini bagaimana menggerakkan masyarakat kita melakukan 3M Plus ini, yaitu menguras, menutup, mendaur

“Angka kematian paling tinggi itu untuk anak 5-14 tahun, baru diikuti dewasa usia produktif.”

DEWI SARI  
Dokter spesialis anak

ulang kemudian ditambah dengan melakukan vaksin," tutur Rusdin.

"Kita bersama Kemenkes, seluruh dinas maupun puskesmas bergerak secara bersama. Jadi mudah-mudahan demam berdarah ini zero kematian," sambungnya.

Sementara itu, dokter spesialis anak Dewi Sari menyebut vaksin DBD dianjurkan dilakukan dua kali dengan jarak tiga bulan.

"Vaksin sebaiknya dua kali untuk proteksi lengkapnya

■ Bersambung ke Hal 7



## DPR Usul Gubernur Dipilih oleh DPRD

Jakarta, MIMBAR - Wakil Ketua Banggar DPR Dr H Jazilul Fawa'id SQ, MA (53) mengusulkan pilkada di tingkat provinsi untuk jabatan gubernur dan wakilnya, dipilih melalui DPRD masing-masing provinsi, bukan lagi oleh rakyat secara langsung.

Menurut politisi PKB asal Gresik, Jawa Timur, itu, perlu dilakukan karena pencoblosan serentak menelan anggaran besar.

Tingginya biaya pemilihan gubernur itu terlihat pada Pilkada 2024.

Misalnya, pemerintah harus mengeluarkan biaya lebih dari Rp1 triliun untuk Pilkada Jawa Barat, belum lagi ditambah biaya pemilihan gubernur di wilayah lainnya.

"Itu bukan anggaran yang kecil. Kalau yang Rp1 triliun itu diberikan ke salah satu kabupaten di salah satu provinsi, di NTT misalnya, itu bisa membuat ekonomi bangkit," kata Jazilul di Jakarta, dilansir dari Antara, Ahad (1/12).

■ Bersambung ke Hal 11



■ Maju Tak Gentar Membela yang Benar!  
■ Hehehe...

## BANJIR BESAR LANDA MALAYSIA, LEBIH DARI 80 RIBU ORANG MENGUNGI:

Banjir besar melanda wilayah Malaysia utara dan Thailand selatan. Pejabat berwenang di kedua negara pada 29 November 2024 mengatakan banjir telah menewaskan sedikitnya delapan orang. Di Malaysia, banjir memaksa lebih dari 80.000 orang dievakuasi ke 467 tempat penampungan sementara hingga akhir pekan ini. Bencana banjir di Malaysia yang kian meningkat dikhawatirkan bisa menjadi yang terburuk dalam satu dekade terakhir. (Foto Liputan6.com via AFP)



## Bobby-Surya Menang....

Dari Halaman 1

Data merupakan hasil pengambilan scraping (goresan) dari laman <https://pilkada2024.kpu.go.id> yang menampilkan dokumen C atau hasil rekapitulasi suara di TPS. Data ini bertujuan memberikan visualisasi grafis dan bukan merupakan publikasi resmi KPU.

### PSS DAN PSL

Ketua KPU Sumut Agus Arifin mengatakan, sebanyak 110 TPS yang tersebar di lima kabupaten/kota akan dilakukan PSS (pemungutan suara susulan) dan PSL (pemungutan suara lanjutan). Kabupaten/kota itu adalah Medan, Deliserdang, Asahan, Binjai, dan Nias.

## Tercatat 52...

Dari Halaman 1

gan jarak tiga bulan. Dewasa perlu, karena dikasih untuk anak 6 tahun sampai usia 45 tahun. Dewasa ini high risk untuk terkena DBD umur 5-44 tahun," tuturnya.

"Namun angka kematian paling tinggi itu untuk anak 5-14 tahun, baru diikuti dewasa usia produktif," lanjutnya.

Dewi menyebutkan jika penyakit DBD tidak hanya menyerang berdasarkan

### DOMINASI

Menurut penelusuran media, Bobby-Surya mendominasi hampir di semua daerah. Dari total 33 kabupaten/kota di Sumut, pasangan ini berhasil sapu bersih keunggulan di 30 daerah.

Termasuk, daerah dengan jumlah pemilih yang tinggi, seperti Deliserdang, Medan, Langkat, dan Simalungun, berhasil menjadi kantong suara bagi Bobby.

Pasangan Bobby-Surya cuma kehilangan dominasi di tiga daerah yakni Mandailing Natal, Kota Tanjungbalai, dan Kota Binjai, yang menjadi ceruk suara pasangan Edy-Hasan. (tr/cp/js)

umur namun juga gaya hidup.

"Sebenarnya rentan terkena DBD bukan hanya usia tapi juga gaya hidup dan lingkungannya agar rumah kita terbebas dari nyamuk DBD. Anak di bawah 5 tahun ke atas sekarang lebih rentan dibanding 6 tahun ke atas karena mereka yang di bawah 5 tahun belum ada vaksin. Jadi kalau di bawah 5 tahun harapan kita 3M plus. Vaksin ini sangat penting, hanya perlu 2 kali," ucapnya. (det/js)



## Hidayah

## UMP Naik...

Dari Halaman 1

Pemerintah juga berpedoman pada keputusan Mahkamah Konstitusi untuk menyusun kebijakan ini. Namun, beberapa pihak menilai kenaikan tersebut belum cukup signifikan untuk mengimbangi inflasi atau meningkatkan daya beli pekerja, sementara pengusaha khawatir kenaikan ini dapat memengaruhi keberlanjutan bisnis.

Kenaikan UMP sebesar 20% tentu lebih signifikan dalam meningkatkan daya beli pekerja dan mengimbangi inflasi. Namun, kebijakan seperti ini harus mempertimbangkan kemampuan pengusaha untuk mencegah dampak negatif seperti pengurangan tenaga kerja atau bahkan penutupan usaha. Pemerintah perlu menyeimbangkan kepentingan pekerja dan dunia usaha melalui dialog sosial yang konstruktif dan solusi jangka panjang, seperti insentif bagi pengusaha yang berkomitmen meningkatkan kesejahteraan pekerja.

Dalam perspektif teori komunikasi, kebijakan Presiden Prabowo untuk menaikkan UMP 6,5% dapat dianalisis melalui teori komunikasi persuasif dan teori legitimasi. Teori Komunikasi Persuasif menilai keputusan ini mungkin dimaksudkan untuk membangun dukungan dari kelompok buruh dan masyarakat pekerja. Dengan komunikasi yang strategis, pemerintah dapat menyampaikan alasan kebijakan ini untuk menunjukkan keberpihakan pada pekerja, meski tetap mempertimbangkan kondisi ekonomi.

Teori Legitimasi menilai kebijakan ini juga dapat dianggap sebagai upaya memperkuat legitimasi politik pemerintah. Dengan mendengarkan aspirasi serikat pekerja dan pengu-

saha, Prabowo menunjukkan kepedulian terhadap keseimbangan ekonomi, sehingga memperkuat kepercayaan publik.

Dalam perspektif teori komunikasi politik, langkah Presiden Prabowo menaikkan UMP sebesar 6,5% bisa dilihat sebagai strategi untuk memenuhi ekspektasi politik dan menunjukkan komitmen terhadap janji kampanye. Kebijakan ini memperkuat narasi bahwa pemerintah peduli terhadap kesejahteraan rakyat kecil, khususnya buruh.

Namun, dalam konteks janji untuk menyejahterakan rakyat, kenaikan ini dapat dianggap belum optimal, terutama jika dibandingkan dengan tuntutan kenaikan lebih tinggi (misalnya 20%). Komunikasi politik yang kuat diperlukan untuk menjelaskan alasan kenaikan tersebut, termasuk tantangan ekonomi, guna menjaga kepercayaan publik terhadap kepemimpinan Prabowo.

Jika para buruh menolak kenaikan UMP 6,5%, presiden dapat mengambil langkah berikut yakni mengundang perwakilan buruh, pengusaha, dan pakar ekonomi untuk berdiskusi dalam forum tripartit guna mencari solusi yang adil.

Menyampaikan secara transparan alasan penetapan angka kenaikan, seperti pertimbangan daya saing ekonomi, inflasi, dan kemampuan pengusaha.

Kemudian juga menawarkan subsidi atau insentif lain, seperti program pelatihan, bantuan sosial, atau pengurangan pajak untuk pekerja berpenghasilan rendah. Penting juga merancang reformasi struktural untuk meningkatkan kesejahteraan buruh, seperti investasi dalam pendidikan dan kesehatan.

Pendekatan ini dapat meredakan ketegangan sekaligus menjaga stabilitas ekonomi dan sosial. \*\*

## Banteng Siapkan...

Dari Halaman 1

La memberi contoh penjabat (pj) KDh (kepala daerah) mengganti camat di beberapa wilayah demi kemenangan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur tertentu.

"Terjadi juga pj KDh di Jawa Tengah, hal seperti ini kami break down, kemudian menyampaikannya ke MK melalui permohonan kami," ujar Ronny.

### PENJAGA KONSTITUSI

Menurut alumni hukum U-Atmajaya Jakarta dan UGM Yogyakarta, itu, MK sudah tegas memutus perkara 136 terkait dengan sanksi pidana terhadap pejabat daerah dan anggota TNI/Polri.

Ia pun berharap, MK yang kini diketuai hakim karir Dr Suhartoyo SH, MH (65) dan wakil akademisi Prof Dr Saldi Isra SH, MPA (56) bisa menjadi penjaga konstitusi terakhir dalam menyikapi temuan-temuan ini.

"Kami berharap sekali nantinya di persidangan PHPU (perselisihan hasil pemilihan umum) di MK, hakim bisa melihat secara luas, tidak hanya terpatok pada pasal per pasal, tetapi bagaimana MK bisa mengembalikan demokrasi," ujar Ronny.

### BERTUMBANGAN

Dalam catatan, cabug PDIP pimpinan Mega-

wati Soekarnoputri memang banyak bertumbangan pada pemilihan gubernur.

PDIP kalah dari cabug yang diusung Gerindra pimpinan Prabowo Subianto, misalnya di Jateng, Jatim, Banten, Sumut, dan Sulut.

Pada Pilgub Jateng 2024, paslon Ahmad Luthfi-Taj Yasin Maimoen unggul telak atas paslon Andika Perkasa-Hendrar Prihadi. Hasil hitung cepat Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) untuk Pilgub Jateng 2024, mencatat Luthfi-Taj Yasin unggul di angka 59,09%. Di Jawa Timur setali tiga uang.

Paslon Khofifah Inder Parawansa-Emil Eles-tianto Dardak meraih 59,6% suara berdasarkan hitung cepat Poltracking Indonesia. Khofifah-Emil yang maju diusung Gerindra, Demokrat, Golkar, PAN, dan sejumlah partai lain mendapatkan restu Prabowo.

Mereka mengungguli paslon Tri Rismaharini-Gus Hans dengan perolehan suara 31,45%. Paslon yang diusung PDIP tersebut kalah secara merata di sejumlah kabupaten/kota di Provinsi Jatim.

Di Banten juga sama. Cabug Andra Sony-Achmad Dimiyati Natakusuma unggul di hitung cepat KedaiKopi dengan suara 55,16%. Andra merupakan ketua Gerindra Banten yang sempat tidak diunggulkan. Sedangkan kandidat lainnya yang lebih diunggulkan, Airin Rachmi Diany-Ade Sumardi hanya memperoleh 44,84% suara. Ade yang menjabat ketua PDIP Banten

harus menelan kekalahan pahit pada pesta demokrasi kali ini.

Di Sumatra Utara, kader Gerindra juga berjaya. Sumut adalah provinsi di luar Jawa dengan suara terbesar. Bobby Nasution-Surya --menantu Jokowi-- unggul dengan meraih 62,79% suara berdasarkan hitung cepat Indikator. Bobby kader Gerindra yang sebelumnya berasal dari PDIP kala maju Pilwalkot Medan 2020. Sedangkan paslon yang diusung PDIP, Edy Rahmayadi-Hasan Basri Sagala harus menerima suara 32,21%.

Di Sulawesi Selatan, cabug yang diusung Gerindra juga unggul telak.

Paslon Andi S Sulaiman-Fatmawati R meraup 76,10% menurut hitung cepat Indikator. Sedangkan paslon yang diusung PDIP Ramdhan Pomanto-Azhar Arsyad hanya mengumpulkan 23,90% suara.

Kader Gerindra juga menang pada Pilgub Sulawesi Utara. Paslon Yulius Selvanus-Victor Mailangkay mendapatkan 36,48% suara merujuk hitungan cepat Charta Politika. Paslon yang didukung Demokrat, Elly Engelbert Lasut-Hanny J Pajouw di urutan kedua dengan perolehan suara 32,00%.

Di posisi buncit paslon yang diusung PDIP Steven Kandouw-Alfred Denny Tuejeh dengan 31,52% suara. Padahal, gubernur Sulut dua periode sebelumnya, Olly Dondokambe, merupakan bendahara umum DPP PDIP. (rep/js)

## Polisi Ciduk...

Dari Halaman 1

TPPU dan F alias W alias A berperan sebagai agen 40 website judi online," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Ary Syam Indardi melalui keterangan tertulis, Sabtu (30/11).

Polisi turut menyita sejumlah barang bukti dari tangan AA. Yakin, satu ponsel, sembilan rekening saat meringkus AA, dan uang tunai dalam berbagai mata uang senilai Rp724,3 juta. Sementara dari tersangka F, polisi menyita

satu buah panel serta uang tunai sebesar sebesar Rp720 juta.

Dalam kasus ini, polisi masih mengejar empat tersangka lain yang masih buron. Mereka berinisial J, JH, F dan C dan sudah masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO).

Tersangka J (DPO) diketahui berperan sebagai bandar atau pemilik atau pengelola situs judi online. Sedangkan JH, F, dan C selaku agen untuk mencari situs judi online. (cnni/js)

## PDIP: Pilkada...

Dari Halaman 1

hasil hitung cepat atau quick count.

Bobby-Surya diusung koalisi besar di antaranya Gerindra, Golkar, PAN, PKS, dan Demokrat dalam KIM (Koalisi Indonesia Maju) Plus.

Sedangkan Edy-Masa diusung oleh PDIP, Hanura, Gelora, Ummat, Buruh, dan PKN.

### MASIH KOKOH

Namun, pada pilkada yang ia gambar terburuk itu, partainya masih dapat berdiri tegak, kokoh, karena berhasil memenangkan pertarungan politik di 15 kabupaten/kota di Sumatera Utara.

"Di tengah upaya sistematis untuk menenggelamkan, PDI Perjuangan Sumut hari ini bisa membuktikan banteng di Sumut masih

tetap kokoh berdiri dan berhasil menggagalkan upaya-upaya sistematis untuk menghancurkan PDI Perjuangan," kata Ketua PDIP Sumut Rapidin Simbolon, Jumat (29/11).

Ia mengurai, partainya menang di seluruh Kepulauan Nias (Nias Selatan, Nias Barat, Nias, Gunungsitoli, Nias Utara), serta Tapanuli Tengah, Humbang Hasundutan, Serdangbedagai, Tebingtinggi, Asahan, Labuhanbatu Selatan, Tapanuli Selatan, Langkat, Deliserdang dan Pakpak Bharat.

Namun masih ada beberapa daerah yang terus diperjuangkan, mengingat tingkat masivitas kecurangan yang terjadi, ditambah adanya bencana alam. "Namun kita masih berkoordinasi dengan DPP terkait hal ini," ujarnya. (beritasatu/cp)

## DPR Usul...

Dari Halaman 1

tetap berjalan dan rakyat harus mendapat kesempatan untuk partisipasi.

Kendati demikian, penggunaan anggaran harus tetap menjadi perhatian.

Persoalan biaya politik itu, kata dia, harus menjadi pembicaraan di antara partai-partai politik.

Dia mengatakan pembahasan itu bisa pada momen revisi paket undang-undang politik dengan sistem omnibus law, yang menggabungkan UU Partai Politik, UU Pemilu, dan UU Pilkada.

Selain pemilihan gubernur melalui DPRD, dia juga mengusulkan pemisahan antara pemilihan umum anggota legislatif (pileg) dengan pemilihan presiden (pilpres) agar tidak bersamaan.

Ia berpendapat bahwa pelaksanaan pileg dan pilpres secara serentak menyebabkan calon anggota DPR luput dari perhatian masyarakat. Pasalnya, pikiran dan perhatian masyarakat tertuju pada pemilihan presiden. (ant/tem/js)